
KONFLIK SOSIAL DALAM KEGIATAN KEAGAMAAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Muhammad Fajar¹, A. Nurul Mutmainnah², Abd Rasyid³

¹Muhammad Fajar, *Institute Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia*

²A. Nurul Mutmainnah, *Institute Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia*

³Abd Rasyid, *Institute Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia*

Muhammad Fajar, muhammadfajar@iainpare.ac.id

ABSTRAK: Kehidupan masyarakat beragama tidak lepas dari kegiatan-kegiatan keagamaan, dalam hal ini masa pandemi Covid-19 dalam kegiatan keagamaan tak luput dari perubahan sosial dalam masyarakat beragama terutama di Kota Parepare. Dengan demikian dalam penelitian ini berusaha menganalisis konflik serta relasi kuasa yang terjadi pada masyarakat dengan beragam kegiatan-kegiatan keagamaan dari berbagai agama-agama yang ada. Penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan data berbentuk narasi, cerita, ungkapan dari informan. Sementara Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Informan dalam penelitian berdasar pada kebutuhan dalam penelitian ini diantaranya tokoh agama, aparat pemerintah, masyarakat serta wacana yang menarasikan tentang konflik dan relasi kekuasaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masa pandemi covid-19 idealitas beribadah secara berjamaah mengalami berubah drastis. Pelaksanaan ibadah rutin tidak lagi dilakukan di masjid, gereja, atau vihara tetapi dilaksanakan di rumah masing-masing. Orang yang terlibat pun sangat terbatas, dalam hal ini hanya melibatkan anggota keluarga yang ada di rumah. Didasari oleh pengetahuan dan kekuasaan hal tersebut juga sangat bersangkutan dengan relasi kuasa antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Kondisi pandemi covid-19 membutuhkan sikap yang terbuka dan "fleksibel" bagi umat beragama untuk memadukan dua kepentingan yang berbeda. Ketika ajaran agama memerintahkan untuk beribadah secara komunal diperhadapkan pada ragam aturan pemerintah, maka banyak hal yang sebaiknya dikompromikan.

Kata Kunci : Konflik, Agama, Relasi Kuasa, Covid-19, Masyarakat, Pemerintah

1. Pendahuluan

Agama telah lama menjadi bagian kajian dalam ilmu sosial, agama bagi pemeluknya telah menciptakan ikatan bersama, bahkan nilai-nilai agama yang banyak bersifat sakral, cenderung dipertahankan sehingga tidak berubah, agama kemudian benar-benar fungsional dalam melestarikan nilai-nilai sosial, meski agama diakui memiliki fungsi efektif dalam kehidupan sosial, namun juga diakui bahwa agama memiliki kekuatan yang menceraiberaikan, memecah belah, bahkan menghancurkan masyarakat. Agama dapat menjadi faktor integrating sekaligus disintegrating factor, agama ternyata tidak selamanya bersifat memelihara dan menstabilkan.

Banyak kasus konflik keagamaan, pihak yang berselisih dalam mempertahankan pandangan keagamaannya ternyata juga didasarkan pada keyakinan tertentu, yaitu tafsir terhadap teks-teks Al-Qur'an, hadis, maupun pendapat para tokoh yang menjadi panutan mereka, apabila keyakinan individu itu diharapkan pada keyakinan individu kelompok agama lain, maka dipastikan akan lahir potensi-potensi konflik, terhadap ayat di atas, para ulama tafsir memaknai kata "Al-Silmi" dengan dua makna, yaitu Islam dan perdamaian, pakar tafsir M. Quraish Shihab berkomentar terhadap ayat diatas, bahwa menurutnya agama Islam adalah agama yang mendamaikan, menyelamatkan, lezat dan nikmat, mudah dan tidak mempersulit, ringan dan tidak memberatkan, menyenangkan, dan tidak menakutkan.

Para Mufassir Yang Lain Seperti Musthofa Al-Maraghi, Sayyid AL-Alusi Dan Imam A-Qurthubi, Menjelaskan Bahwa Menurut Mereka Manusia Terbagi Menjadi Dua Golongan, Yakni Golongan Yang Baik Dan Golongan Yang Rusak. Golongan Pertama ialah Manusia Yang Hanya Mengharapkan Keridhaan Allah Atas Amal Perbuatannya Dan Mengutamakan Kepentingan Orang Lain.

Copyright: © 2022 the Author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Published by Al-Kindi Centre for Research and Development, London, United Kingdom.

Golongan Kedua Yakni Manusia Yang Selalu Menimbulkan Kerusakan Dimuka Bumi, Memunculkan Kekerasan Dan Memancing Permusuhan Satu Sama Lain Antar Manusia di Muka Bumi.

Pernyataan para ulama yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa melalui ayat tersebut bahwa Allah memberi nasihat kepada manusia yaitu bahwa ciri khas orang-orang yang beriman ialah mengedepankan sikap persatuan bukan pecah belah dan tercerai-berai. Hal yang berbeda akan terjadi pada perilaku keberagaman masyarakat, yang di mana juga mengalami gelombang pasang, khususnya di kalangan umat islam. Dalam satu tahun terakhir ini, tatanan sosial dan perilaku sosial mengalami banyak perubahan karena pandemi virus corona yang melanda hampir seluruh Negara di dunia.

Kementerian Agama menilai potensi konflik dan kekerasan dapat saja terjadi seiring meluasnya pandemi Covid-19 yang tidak kunjung berakhir. Isu yang melatarbelakangi konflik bisa berbagai macam, mulai dari isu politik hingga isu agama. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag RI, menilai wilayah yang luas, masyarakat yang heterogen, dan banyaknya agama serta aliran menjadi celah yang dapat menjadi pemicu konflik.¹

Kondisi sosial keagamaan di Kota Parepare selama masa pandemi covid-19 juga tidak lebih baik dari pada kota-kota yang lain. Banyaknya aturan yang berlaku dan pembatasan-pembatasan berskala besar yang terjadi untuk memutus rantai covid-19. Hal ini sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan hanya rantai wabah yang terputus tetapi juga rantai pencaharian, dan sosialisasi masyarakat ikut terputus. Banyak nya Pemutusan Hubungan Kerja, dilarangnya kegiatan ibadah baik shalat berjamaah sampai acara besar keagamaan seperti Maulid Nabi Muhammad SAW dan Lebaran Idul Fitri & Adha.

Melihat konflik sosial yang berbasis agama serta perubahan sosial yang terjadi akibat kebijakan kekuasaan, maka peneliti memutuskan untuk mencari akar sekaligus solusi dari kasus konflik kegiatan keagamaan yang terjadi di masyarakat khususnya Kota Parepare

2. Konflik dan Relasi Kekuasaan

2.1. Relasi Kekuasaan

Teori relasi kekuasaan Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan, kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan, menurutnya bahwa kekuasaan tidak dipahami sebagai sebuah kepemilikan layaknya property atau posisi, melainkan dipahami sebagai sebuah strategi dalam melibatkan relasi-relasi beragam,² gagasan mengenai kuasa merupakan inti atau pusat pemikiran dan pandangan filosofis Foucault, tanpa gagasan dasar mengenai kuasa ini akan sulit untuk memahami Foucault dan pemikirannya. Dengan kata lain, analisisnya tentang kuasa membantu untuk memahami gagasan etisnya mengenai subyek atau *care for the self* yang merupakan puncak pemikirannya.

Pelaksanaan kuasa itu tidak mungkin apabila tidak ada rezim wacana dan kebenaran yang bersifat esensial dalam setiap kebudayaan dan berbagai peristiwa historis, dan analisis Foucault tentang pelaksanaan kuasa akan mengantarkan pada gagasan dasarnya kehendak untuk memperoleh kebenaran. Bila dalam analisis sebelumnya menganggap proses tersebut berlangsung secara alamiah, maka kepada audiens di situ ia secara baru menekankan bahwa proses pembentukan dan penyebaran gugus diskursif tersebut ternyata tidak bebas dari limitasi, seleksi dan kontrol. Kesadaran akan adanya limitasi, seleksi, kontrol dan organisasi dapat dikatakan merupakan pintu awal yang menghantarkan pemikiran arkeologi Foucault masuk menuju pemikiran kekuasaan. Foucault mengakui bahwa ada sekian banyak kekuatan dan kuasa yang menyebar luas dalam relasi antar manusia. Kekuatan-kekuatan ini ditemukan dalam berbagai aspek relasi antar manusia, misalnya relasi antar manusia dengan manusia lain dan juga relasi manusia dengan lingkungan dan situasi mereka, dan lain-lain.³

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi peningkatan pertumbuhan covid-19 merupakan bagian dari strategi yang melibatkan relasi kuasa didalamnya, adapun kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pasal 13 ayat 4 PERMENKES No. 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB menyebutkan bahwa "Pembatasan kegiatan

¹ Fuji E Permana, 'Kemenag Waspadai Potensi Konflik Beragama Di Tengah Pandemi', *Republika. Com*, 2020.

² Charles Marulan Gultom and others, 'Teori Kekuasaan Dalam Kriminalisasi Ulama Studi Kasus Yusuf Roni Atas Tindakan Orde Baru Mengkriminalisasi Ulama Menurut Teori Kekuasaan Michel Foucault', *Pute Waya: Sociology of Religion Journal*, 2.2 (2021) hlm 64–80.

³ Wahyuddin Bakri, *Hegemoni Politik, Kekuasaan Dan Media*, ed. by Andi Zulfayani, Edisi 1 (Parepare, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusanantara Press, 2022).

Ihsan Ali Fauzi mengartikan konflik keagamaan sebagai, “perseteruan menyangkut nilai, klaim, dan identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan”. Konflik keagamaan dapat diartikan suatu pertikaian antar agama baik sesama agama maupun dengan agama lain.

Teori fungsionalisme konflik yang dibangun oleh Alfred Coser memulai pendekatannya dengan suatu kecaman terhadap teori fungsional yang sangat menekan *consensus normative*, keteraturan dan keselarasan. Dalam pandangan aliran fungsionalisme, agama dilihat sebagai sesuatu institusi yang bertugas (berfungsi) agar masyarakat dapat mewujudkan cita-citanya.⁷

1. Bentuk-bentuk Kegiatan Keagamaan

Kegiatan keagamaan merupakan segala perbuatan atau aktivitas keagamaan yang ada hubungannya dengan agama, baik berupa kepercayaan maupun nilai-nilai yang menjadi rutinitas dalam kehidupan dan menjadi pedoman dalam menjalani hubungan kepada Allah SWT dan lingkungan sekitarnya. Bentuk-bentuk kegiatan keagamaan tersebut diantaranya adalah:

- a. Shalat, Kata shalat berasal dari bahasa Arab yang dapat berarti do'a. Menurut Zuhaili secara bahasa shalat berarti do'a, sedangkan secara istilah adalah segenap ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan salam. Selain itu, shalat juga dapat diartikan sebagai rahmat dan mohon ampun. Dalam agama Islam, shalat adalah ibadah yang menempati posisi penting yang tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun juga.⁸
- b. *Tilawatil Tahsin al-Qur'an* (TTQ), Kegiatan ini merupakan pelatihan baca al-qur'an dengan penekanan pada metode baca yang benar dan kefasihan bacaan berdasarkan kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid.
- c. Peringatan Hari-Hari Besar Islam. Kegiatan ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Miraj, dan lain-lain.⁹
- d. Dakwah menjadikan perilaku muslim dalam menjalankan Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* yang harus didakwahkan kepada seluruh manusia, yang dalam prosesnya melibatkan unsur: *da'i* (subyek), *maaddah* (materi), *thoriqoh* (metode), *wasilah* (media), dan *mad'u* (objek) dalam mencapai *maqashid* (tujuan) dakwah yang melekat dengan tujuan Islam yaitu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian teori tersebut yang dimaksud dengan “Relasi Kuasa Pada Konflik Kegiatan Keagamaan Semasa Pandemi Di Kota Parepare” adalah sebuah kekuasaan yang dipahami sebagai bentuk strategi yang digunakan pemerintahan Kota Parepare untuk mengurangi rantai penyebaran covid-19 yang dapat disebabkan oleh kegiatan keagamaan.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif sementara Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yakni studi atau kajian mendalam terhadap informan dalam waktu tertentu yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam, selanjutnya sumber data dalam penelitian ini dibagi dalam dua sumber, Sumber data primer diantaranya dan sumber data sekunder diantaranya adalah tokoh agama, aparat pemerintah, masyarakat dan data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan sebagainya.¹¹

⁷ Febby Febriyandi, 'Agama, Ritual, Dan Konflik: Suatu Upaya Memahami Konflik Internal Umat Beragama Di Indonesia', *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 2.2 (2019), 123–42.

⁸ Hilyah Ashoumi, *Budaya Religius Basis Pembentukan Kepribadian Religius* (LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2019).

⁹ Ni'Matuz Zahroh and Akhmad Khamdani, 'Kegiatan Keagamaan Dalam Menunjang Pembelajaran PAI Peserta Didik Di SD Yimi', *Tadrisuna: Jurnal Pendidikan Islam Dan Kajian Keislaman*, 3.1 (2020), hlm 17–31.

¹⁰ Ahmad Fauzi and Eva Maghfiroh, 'Problematika Dakwah Di Tengah Pandemi Covid-19', *Jurnal Al-Hikmah*, 18.1 (2020), hlm 23–32.

¹¹ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

dari data yang didapatkan itu, mencoba mengambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat, yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.¹⁶

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Bentuk-Bentuk Konflik Kegiatan Keagamaan di Kota Parepare

Konflik bukanlah suatu fenomena yang obyektif dan nyata, tetapi ada dibenak orang-orang yang terlibat, hanyalah perwujudannya, seperti sedih, berdebat, atau berkelahi yang terlihat nyata, secara umum ada empat bentuk konflik sosial yang bersumber dari agama yaitu, perbedaan doktrin dan sikap mental, perbedaan suku dan rasa pemeluk agama, perbedaan tingkat kebudayaan, dan masalah mayoritas dan minoritas golongan agama, melihat bentuk-bentuk konflik sosial yang bersumber dari agama diatas, di masa pandemi konflik sosial yang berkaitan dengan keagamaan sangat sering terjadi, bahkan konflik sosial keagamaan jauh lebih sensitif di masa ini.

Bentuk konflik yang pertama yaitu, perbedaan doktrin dan sikap mental merupakan kategori sosiologis yang bertolak belakang dengan pengertian perdamaian ataupun kerukunan, adanya bentuk konflik ini disebabkan proses asosiatif dan proses disosiatif, dalam konteks ini, konflik menjadi fakta sosial yang ada di masyarakat yang dapat melibatkan minimal dua pihak yang berbeda agama, adanya sikap yang membenarkan agama masing-masing, maka menimbulkan polemik pada masyarakat beragama

Bentuk konflik perbedaan doktrin dan sikap mental juga termasuk tentang masyarakat yang terdoktrin untuk tidak mematuhi aturan-aturan yang di keluarkan oleh pemerintah, serta sikap mental yang harus disiapkan masyarakat dalam melalui masa pandemi ini, perbedaan persepsi ini diungkapkan oleh Pak Dede Harirustaman selaku Camat Soreang bahwa:

.....Yang saya rasakan inisangat luar biasa bisa menyebabkan suatu persepsi yang berbeda baik itu dari jajaran pemerintahan ataupun di jajaran masyarakat, dan terkait dengan beberapa masalah'pembatasan rumah ibadah yang kemarin sempat dirasakan banyak juga masyarakat yang bisa menerima dan ada juga yang tidak menerima, karena kita ketahui beberapa ibadah bisa dilakukan di rumah. Dan tugas pemerintah adalah bagaimana cara memutus mata rantai covid-19 ini....karena memang banyak masyarakat yang terpukul dengan hal demikian. Karena banyak yang menjadikan rumah ibadah sebagai lokasi penentraman hati tapi dibatasi oleh pembatasan pemerintah.....¹⁷

Di masa pandemi covid-19, idealitas beribadah secara berjamaah berubah drastic, pelaksanaan ibadah rutin tidak lagi dilakukan di Mesjid, Gereja, atau Vihara tetapi dilaksanakan dirumah-rumah, orang yang terlibat pun sangat terbatas, dalam hal ini hanya melibatkan anggota keluarga yang ada di rumah.Seruan adzan sebagai penanda masuknya waktu salat tetap dikumandangkan dari masjid-masjid,namun jamaah tetap menunaikan salat dirumah masing-masing. Tidak sedikit umat muslim dan masyarakat agama berbeda yang menjalankan ibadah secara terbatas baik di rumah maupun di tempat kerjanya.

.....dari apa yang telah kita alami di dua tahun ini memang pandemi yang telah terjadi terutama di kota Parepare itu memang ada dan tentunya di awal-awal itu mengganggu di mana banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang banyak orang itu dibatalkan atau bahkan dikurangi, di mana kita tahu bahwa risiko besar daripada pandemi pada saat itu adalah adanya mata rantai virus baru di mana kita belum mendapatkan vaksin dan beberapa penanganan-penanganan lain yang mampu memutus mata rantai pandemi covid-19 pada saat itu. Kurang lebih kita harus lebih berhati-hati terhadap adanya pandemi ini.....¹⁸

Bentuk konflik kedua yaitu perbedaan suku dan ras pemeluk agama, sebenarnya perbedaan suku dan ras pemeluk agama bukanlah penghalang untuk terciptanya hidup yang rukun antar saudara, akan tetapi dari perbedaan suku dan ras tersebut menjadikan sebuah konflik yang dapat timbul dengan adanya perbedaan, tidak hanya itu dari semua perbedaan melalui suku dan etnis menjadikan suatu kebudayaan yang berbeda, hal ini terlihat jelas di Kota Parepare yang pernah menjuluki Kota Bandar Madani, wilayah kota Parepare dihuni dengan beragam etnis mulai dari Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, bahkan Tionghoa. Perbedaan suku dan ras agama yang ada di Kota Parepare tak menutup kemungkinan terjadinya konflik-konflik

¹⁶ Anggito and Setiawan.

¹⁷Lihat Dede Harirustaman, Camat Soreang, Wawancara di Kantor Camat Soreang 23 Juni 2022

¹⁸Lihat Peter, Ketua Vihara Buddha Dharma Parepare, Wawancara Tanggal 27 Juni 2022

relasi-relasi beragama, kekuasaan tidak berpusat pada satu objek atau lembaga, melainkan tersebar dimana-mana dalam setiap relasi sosial.²⁰

Kekuasaan juga meliputi serta menciptakan pengetahuan yang mengarah pada kebenaran, cara kerja kekuasaan dengan mempengaruhi serta merubah cara berpikir seseorang sehingga dapat terjadi perubahan, bentuk kekuasaan bukanlah *Sovereign Power* (Kekuasaan Berdaulat) melainkan *Disciplinary Power* (Kekuasaan Disiplin) dalam masyarakat modern. *Disciplinary power* bukan konsep kekuasaan berdasarkan otoritas untuk melakukan penghukuman dan kontrol secara represif seperti *sovereign power*, namun menormalisasi adalah sebagai kendaraan bagi kekuasaan²¹

Kekuasaan selalu mengandaikan ada orang menjadi penguasa dan yang lain dikuasai, sedangkan pengertian kuasa oleh Foucault sangat netral. Foucault juga mengakui bahwa kata kuasa bisa mengantar orang ke pengertian dominasi dalam arti ada orang menguasai yang lain dan dikuasai, penggunaan kuasa seperti ini sangat berat sebelah, dalam arti ada pihak lemah yang selalu ditekan dan ada pihak kuat dan berpengaruh yang selalu mendominasi yang lain, padahal arti kuasa menurut Foucault sangat netral dan bahwa kuasa seperti ini abadi dalam diri setiap orang,²² praktiknya kekuasaan bekerja dalam pengetahuan dan wacana, pengetahuan tersusun melalui wacana-wacana yang telah melalui kajian menggunakan metode yang bersifat ilmiah.

Wacana yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kegiatan keagamaan semasa pandemi covid-19 yang mengumpulkan orang banyak atau beribadah secara komunal, pandemi covid-19 yang disebabkan oleh virus yang dapat menular dengan cepat tersebut menormalisasi perilaku masyarakat yang awalnya dianjurkan melakukan ibadah dan melakukan perayaan-perayaan hari raya secara bersama-sama justru ditiadakan, perubahan ini jelas melalui beberapa penelitian mendalam terkait virus hingga dibuatnya sebuah aturan oleh pemerintah dengan maksud sebagai langkah preventif dalam situasi pandemi. Sejalan dengan alur yang dapat dijelaskan oleh Dede selaku Camat Soreang setelah dikeluarkannya Surat Edaran terkait pelaksanaan peribadatan dirumah masing-masing, bahwa

.....Pertama kami lakukan adalah mengedukasi masyarakat secepatnya, secara rutin dengan menjelaskan maksud dan tujuan dibuatnya aturan pemerintah yang sebenarnya linear dengan aturan Provinsi sampai ke daerah khususnya Kota Parepare, yang kedua kami menyampaikan keadaan penyebaran virus covid-19 khusus di daerah Soreang, itu kami sampaikan agar masyarakat tau dan paham terkait penyebaran hingga keadaan yang terjadi di masyarakat ini. Karena bila tidak disampaikan bisa jadi masyarakat akan abai, yang ketiga kami melakukan kerjasama dengan TNI dan polri terkait pemantauan kegiatan-kegiatan masyarakat biasanya juga termasuk kegiatan masyarakat yang ada di rumah ibadah. Bila seumpamanya ada yang masih tetap melakukan ibadah akan tetap kami sampaikan agar segera menyelesaikan ibadah, laksanakan protokol kesehatan dan bila selesai langsung kembali ke rumah. Hal ini kami lakukan agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan...²³

Konsep kuasa dikemas Foucault dalam bukunya *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* dan *The History of Sexuality 1: An Introduction*. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa tema ini juga selalu kelihatan dalam tema mengenai pengetahuan dan kebenaran dan juga tampak jelas dalam pembahasannya mengenai tema terakhir, yaitu subjektivitas atau kesadaran manusia sebagai makhluk etis, Foucault sendiri tidak pernah memberikan definisi kata kuasa karena menurutnya itu tidak penting, tampak Foucault ingin menghindarkan diri dari definisi yang menjelaskan esensi dan makna kata itu lantaran tidak ingin mendengar kata-kata yang menjelaskan esensi, dasar, fondasi, dan yang serupa dengan itu, yang jauh lebih penting baginya adalah bagaimana kuasa itu dipraktikkan dalam hidup pribadi dan dalam komunikasi antarmanusia.²⁴

Kuasa kerap membawa orang pada pemahaman tentang kekuasaan atau kuasa yang represif, namun tidak hanya itu kuasa juga dimengerti sebagai suatu strategi dalam relasi antarmanusia yang disebutnya sebagai relasi-relasi kuasa, relasi-relasi kuasa ini tampak dalam hubungan antar manusia, dalam pemahaman kuasa sebagai relasi strategis orang dapat menemukan beberapa pokok pikiran sebagai berikut :

²⁰ Hasse Jubba, 'Beradaptasi Dengan Bencana: Strategi Beribadah Umat Islam Dan Kristen Di Tengah Pandemi Covid-19', *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 5.1 (2021), 1–14.

²¹ Gultom and others.

²² Konrad Kebung, 'Membaca 'Kuasa' Michel Foucault Dalam Konteks 'Kekuasaan' Di Indonesia', *Melintas*, 33.1 (2017), 34–51.

²³ Lihat Dede Harirustaman, Camat Soreang, Wawancara di Kantor Camat Soreang 23 Juni 2022

²⁴ Jubba.

4.2.1. Kuasa secara esensial muncul dari relasi-relasi antara pelbagai kekuatan (forces). Ada secara mutlak dalam relasi ini dan bersifat a priori, dalam arti tidak bergantung pada kesadaran manusia. Jelas bahwa kuasaini bukanlah sesuatu yang diterima sebagai milik yang dapat diperoleh dan dibagi-bagi. Tidak dapat dikurangi dan ditambah, karena kalau kuasa dilihat sebagai milik yang dapat dikurangi atau ditambah, tidak bisa beralih ke tangan orang lain. Kalau dipindahkan secara paksa pastikan muncul kekacauan, pertikaian, bahkan peperangan. Kuasa seperti ini justru sudah dipraktikkan dalam kehidupan sebelum menjadi milik, jelas bahwa kuasa seperti ini sudah ada lebih dulu sebelum dimengerti sebagai kekuasaan atau dominasi antar manusia

Sejalan dengan yang terjadi di Kota Parepare terhadap kegiatan keagamaan semasa pandemi Covid-19, relasi-relasi antara berbagai kekuatan (forces) seperti pemerintahan dalam hal kedinasan dan penegakan aturan terhadap protokol kesehatan merupakan satuan tugas dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) kemudian turun ke struktur wilayah Kecamatan membangun relasi dengan pihak tokoh-tokoh agama dalam melakukan pendisiplinan terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan keagamaan diluar prosedur atau aturan pemerintah, hal ini dimaksudkan agar dapat meredakan konflik berkepanjangan yang disebabkan oleh perbedaan persepsi antara pemerintahan dan masyarakat. Berikut pernyataan dari Pak Dede selaku Camat Soreang terkait upaya pemerintah dalam meredakan gesekan antara sesama masyarakat atau antara pemerintah dengan masyarakat

ada masyarakat yang menerima aturan pemerintah ada juga masyarakat yang tetap ingin melaksanakan ibadah dirumah ibadah. Hal seperti ini biasanya kami lakukan langkah preventif agar kedua kubu masyarakat tidak ada yang saling bergesekan terkait pemahaman. Biasanya kami dari unsur pemerintah selalu didampingi oleh tokoh-tokoh agama atau tokoh masyarakat untuk turun dan menjelaskan hal demikian demi meminimalisir terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat. Untuk masyarakat yang masih belum memahami maka kami gendeng TNI & POLRI untuk menjelaskan langsung ke masyarakat. Hal demikian mungkin termasuk dalam dinamika yang terjadi diwilayah Soreang.....²⁵

4.2.2. Kuasa ini menyebar di mana-mana (*dispersed*) dan tidak dapat dilokalisasi, di mana ada struktur dan relasi antarmanusia, disana ada kuasa, menentukan aturan secara internal dan tidak tergantung pada sumber yang ada diluarnya, dengan itu jelas bahwa kuasa ini tidak ditentukan oleh suatu subjek yang datang dari luar, sependapat dengan pernyataan diatas bahwa masyarakat mampu membedakan dan melakukan penertiban diri sesuai dengan relasi yang terbangun, relasi antara sesama umat beragama kerap diberikan kepada yang lebih paham persoalan agama. Begitupun langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun *Disciplinary Power* (Kekuasaan Disiplin) untuk penertiban umat beragama yang melakukan pelanggaran terhadap aturan beribadah.

4.2.3. Kuasa dilihat sebagai mekanisme atau strategi yang memberikan penekanan pada praktik dan fungsinya dalam bidang tertentu, kuasa ini dilaksanakan dalam banyak posisi yang dihubungkan secara strategis satu dengan yang lain, setiap relasi kuasa secara potensial mengandung suatu strategi perjuangan (kuasi strategi perang), namun kekuatan-kekuatan itu tidak saling menindih, tidak kehilangan kodratnya yang unik dan tidak kacau, masing-masingnya menentukan semacam batas tetap bagi yang lain.

Dalam bidang peribadatan secara komunal atau ibadah dan perayaan yang mengumpulkan orang banyak, langkah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah pelaksanaan ibadah dirumah masing-masing, bila dihadapkan pada situasi pandemi covid-19 tentu hal tersebut tidak dimaksudkan untuk melarang masyarakat melakukan ibadah atau melakukan perayaan ibadah, hanya memberikan batasan agar tidak terjadi kerumunan dan berimplikasi pada munculnya klaster baru dalam masyarakat, dan penerimaan seperti diatas tampak pada pernyataan Antonius selaku Sekretaris Dewan Pastoral Gereja Katolik Parepare

.....Pada masa itu (Pandemi covid-19 tahun 2020-2021) adalah masa darurat, meskipun sebenarnya banyak keyakinan yang perlu kita hadapi tapi di sisi lain kita juga harus tetap memperhatikan keselamatan. Memang beribadah itu menyelamatkan tapi disini lain mencegah diri dari pandemi juga menyelamatkan.....²⁶

²⁵Dede Harirustaman, Camat Soreang, Wawancara di Kantor Camat Soreang 23 Juni 2022

²⁶Antonius, Sekretaris Dewan Pastoral Gereja Katolik Kota Parepare, wawancara di Warkop Bengkel Kopi 23 Juni 2022

4.2.4. Kuasa dan pengetahuan berkaitan sangat erat. Tanpa praktik kuasa, pengetahuan tidak dapat didefinisikan dan tanpa bentuk, jugatidak punya pegangan dalam objektivitas. Menurut Foucault pengetahuan muncul dari relasi-relasi kuasa dan bukan dari seorang subjek yang tahu. Hal tersebut tampak dari penegakan aturan pemerintah yang tentu perlu masukan dan partisipasi oleh orang-orang yang lebih disiplin dalam pengetahuan agama.

4.2.5. Kuasa biasanya muncul dari bawah dan secara esensial tidak represif. Kendati dua unsur ini ada dalam relasi antarmanusia, esensi kuasa bukanlah represi atau dominasi. Kuasa tidak bekerja melalui represi dan intimidasi, melainkan melalui regulasi dan normalisasi. Tidak bersifat subjektif dan nondialektik, melainkan positif dan konstruktif. Surat Edaran pemerintah terkait beribadah dirumah masing-masing tentu merupakan wujud regulasi dan normalisasi dikarenakan adanya sebuah aturan yang cenderung berbeda dari biasanya, namun diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang mengharuskan hal demikian menjadi langkah yang positif dan konstruktif demi kebaikan bersama.

4.2.6. Kuasa selalu ada resistensi. Namun, resistensi ini tidak pernah ada dalam posisi eksterior dalam hubungan dengan kuasa. Foucault tidak pernah secara langsung melontarkan kritiknya terhadap kebijakan politis atau sosial-kemasyarakatan yang berlaku di Negara tertentu. Beberapa kasus yang menonjol tentang reaksi para cendekiawan terhadap kebijakan pemerintah atau partai komunis juga melibatkan Foucault, tetapi itu lebihdalam gerakan massa yang menuntut sesuatu dari pemerintah atau partai. Resistensi yang terjadi di Kota Parepare menyangkut kegiatan keagamaan jelas ada, dibuktikan dengan adanya perbedaan persepsi antara masyarakat. Wujud tersebut bahkan telah memberikan bentuk nyata saat adanya kegiatan keagamaan yang mengumpulkan orang banyak ditengah berlakunya surat edaran terkait beribadah dirumah masing-masing.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, maka disimpulkan bahwa, secara umum ada empat bentuk konflik sosial yang bersumber dari kegiatan keagamaan yaitu,

(1) Perbedaan doktrin dan sikap mental, dan sikap yang membenarkan agama masing-masing (2) Perbedaan suku dan ras dalam pemeluk agama (3) Fanatisme Budaya, dan (4) Perbedaan kelas keagamaan antara kelompok mayoritas dan minoritas golongan agama

Kemuadian relasi kekuasaan terhadap konflik kegiatan keagamaan yaitu membangun relasi terhadap pihak yang berwenang seperti Kantor Dinas dan Aparat Keamanan, tokoh-tokoh agama hingga masyarakat untuk menegakkan protokol kesehatan, bertujuan untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat dan menghindari konflik dan berdasar relasi antara pihak kemudian menentukan aturan secara internal dan tidak tergantung pada sumber yang ada diluarnya, dengan itu jelas bahwa kuasa ini tidak ditentukan oleh suatu subjek yang datang dari luar.

Daftar Pustaka

- Anggito, Albi, and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018)
- Arikunto, Suharsimi, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik', 2019
- Ashoumi, Hilyah, *Budaya Religiøs Basis Pembentukan Kepribadian Religiøs* (LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2019)
- Bakri, Wahyuddin, *Hegemoni Politik, Kekuasaan Dan Media*, ed. by Andi Zulfayani, Edisi 1 (Parepare, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022)
- Fauzi, Ahmad, and Eva Maghfiroh, 'Problematika Dakwah Di Tengah Pandemi Covid-19', *Jurnal Al-Hikmah*, 18.1 (2020)
- Febriyandi, Febby, 'Agama, Ritual, Dan Konflik: Suatu Upaya Memahami Konflik Internal Umat Beragama Di Indonesia', *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 2.2 (2019)
- Gultom, Charles Marulan, Leonard Halle, Hasahatan Hutahaeen, and Bostang Hamonangan Silaban, 'Teori Kekuasaan Dalam Kriminalisasi Ulama Studi Kasus Yusuf Roni Atas Tindakan Orde Baru Mengkriminalisasi Ulama Menurut Teori Kekuasaan Michel Foucault', *Pute Waya: Sociology of Religion Journal*, 2.2 (2021)
- Jubba, Hasse, 'Beradaptasi Dengan Bencana: Strategi Beribadah Umat Islam Dan Kristen Di Tengah Pandemi Covid-19', *Religiøs: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 5.1 (2021)
- Kebung, Konrad, 'Membaca 'Kuasa' Michel Foucault Dalam Konteks 'Kekuasaan' Di Indonesia', *Melintas*, 33.1 (2017), 34-51
- Patimah, Siti, 'Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner, Sub Judul: Hipotesis Penelitian.' (Ideas Publishing, Kota Gorontalo., 2020)
- Permana, Fuji E, 'Kemenag Waspadaì Potensi Konflik Beragama Di Tengah Pandemi', *Republika. Com*, 2020
- Sudaryono, Wardani Rahayu, and Gaguk Margono, *Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan* (Graha Ilmu, 2013)
- Sufiyanto, Sufiyanto, Sari Yuniarti, and Djoko Andrijono, 'Sosialisasi Dan Edukasi Penilaian Mandiri Terhadap Risiko Penularan COVID-19 Melalui InaRISK Personal', *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 5.3 (2020)
- Syamsuddin, Akbar, 'KONFLIK SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI AGAMA', *Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, Vol 6 (2020) <<https://doi.org/10.35673/ajdsk.v6i1.865>>
- Al Uyun, Dhia, Mirza Satria Buana, Orin Gusta Andini, Debora Pasaribu, Fenyo Ezra Tania, Terra Aura Beningtania Parenden, and others, *COVID-19, Problematik Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Media Sains Indonesia, 2020)
- Zahroh, Ni'Matuz, and Akhmad Khamdani, 'Kegiatan Keagamaan Dalam Menunjang Pembelajaran PAI Peserta Didik Di SD Yimi', *Tadrisuna: Jurnal Pendidikan Islam Dan Kajian Keislaman*, 3.1 (2020)